

ABSTRAK

Sampah merupakan masalah lingkungan yang serius di banyak daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus meningkat. Dalam konteks ini, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 19 huruf d pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan sumber data primer melalui wawancara dan dokumentasi, dan sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah di kabupaten Banyuwangi belum maksimal dan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah. Saran dari hasil penelitian ini Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah dan memperketat pengawasan serta penegakan hukum.

Keywords: Peraturan Daerah Banyuwangi, sarana prasarana, sanksi, pemerintah.



ABSTRACT

Waste is a serious environmental problem in many areas, including Banyuwangi Regency. Along with population growth and economic development, the amount of waste generated by the community continues to increase. In this context, household waste and similar household waste have become one of the main focuses in waste management efforts in Banyuwangi Regency. This study aims to analyze the implementation of Article 19 letter d of Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 6 of 2022 concerning waste disposal not in designated and provided places. This research uses a juridical-empirical approach method with primary data sources through interviews and documentation, and secondary data derived from legislation, journals, and literature books. The results of the study indicate that the implementation of regional regulations in Banyuwangi Regency has not been optimal and still faces various obstacles, such as a lack of public awareness and limited waste management facilities. The suggestions from the results of this study include the need to increase public awareness through socialization and environmental education. In addition, the government needs to improve waste management facilities and tighten supervision and law enforcement.

Keywords : *Banyuwangi Regional Regulation, infrastructure, sanctions, government.*

